

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*, KENCANA, Jakarta.
- Achmad Edi Subiyanto, 2019, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman Dan Pengisian Jabatan*, Rajawali Press, Depok.
- Achmad Ruslan, 2021, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Renggang Education, Tangerang.
- Adnan Jamal, 2009, *Konfigurasi Politik dan Hukum Institusional Judicial Review di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Hasil Penelitian Kerjasama Antara Mahkamah Konstitusi Dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2019, *Constitutional Compliance Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal UNDANG-UNDANG*, PT. Rajagrafindo Persada., Depok.
- Jimlu Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan Konsultasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.

- Kusnu Goesniadhia, 2006, *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Specialis suatu masalah)*, JP BOOKS, Surabaya.
- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Kanisius, Depok.
- Moh. Mahfud MD, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 71.
- Putera Astomo, 2018, *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjachran Basah, 2014, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Penerbit P.T Alumni, Bandung.
- Sri soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2016, *Sejarah Peradilan & Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustak, Yogyakarta.
- Tim GTK DIKDAS, 2021, *Modul Belajar Mandiri Calon Guru Bidang Studi Ilmu Pengetahuan Sosial-Geografi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan., Jakarta.
- Wicipto Setiadi dkk (Tim Penyusun), 2010, *Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan*, Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Jakarta.
- Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo.
- Yunasril Ali, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## Artikel Jurnal

- Kurnia, I, Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, Nomor. 1 Juni 2017.
- Nainggolan, I, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal)", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, Nomor. 1 Juni 2018.
- Nikawanti, G, Ecoliteracy: Membangun Ketahanan Pangan Dari Kekayaan Maritim Indonesia, *Jurnal Kemaritiman: Indonesian Journal of Maritime*, Vol. 2, Nomor 2 Desember 2021.
- Rini, A. M, Penguatan Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Terkait Dengan Perikanan Melalui Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related To Fisheries, *Mimbar Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 32, Nomor. 1 Juni 2020.
- Vica J. E. Saija. Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No 2, Juli-Desember 2014.
- Victor Imanuel W. Nalle, Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, Nomor 3, September 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Wicaksono, D.A. Implikasi Re-Eksistensi Tap Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 2013.
- Widyatmodjo, R. S., & Pujiyono, P, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/pid. sus/prk/2015/pn. amb)", *Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Undip, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2016

Kartika, S. D, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi Dan Penegakan Hukum (Maritime Security From The Aspects Of Regulation And Law Enforcement)", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 5, Nomor. 2 September 2016.

### **Disetrasi**

Abd. Asis, 2015, "*Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*", Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Romi Librayanto, 2016, *Sistem Norma Hukum Dalam Mewujudkan Rumusan Norma Hukum Yang Ideal (Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Di Indonesia)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

### **Undang-Undang dan Peraturan Sejenis**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012, 016, 019/PUU-IV/2006.

## Artikel Internet

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 2020, *Penanganan Tindak Pidana Perikanan Oleh Ppns Perikanan Di Masa Pandemi Covid-19*, <https://kkp.go.id>, diakses pada 25 november 2022 Pukul 16:50 wita.

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, 2022, KKP Perbarui Data Estimasi Potensi Ikan, Totalnya 12,01 Juta Ton per Tahun, <https://kkp.go.id> diakses pada 25 november 2022 Pukul 16:50 wita

Tim Yuridis.id, 2018, *Dapat Dibatalkan Dan Batal Demi Hukum, Apa Perbedaannya?*, <https://yuridis.id/dapat-dibatalkan-dan-batal-demi-hukum-apa-perbedaannya/>, Diakses pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 19:35 wita.